

## **MODEL *NETWORKING* SEKOLAH SEBAGAI BASIS PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

**Suhartanta, Sukoco, dan Zainal Arifin**  
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta  
email: hart\_oto@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model jaringan yang terbaik antara sekolah kejuruan dan para pemangku kepentingan. Penelitian ini dilakukan di sekolah kejuruan di DIY selama tiga tahun. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Sumber data diperoleh dari lapangan kerja, kepala sekolah, dan tim pengembangan sekolah kejuruan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) model jaringan yang dikembangkan dalam penelitian ini sudah efektif untuk memperoleh data dan informasi tentang kebutuhan lapangan kerja, dan 2) Sekolah telah mampu menerjemahkan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk kegiatan operasional dengan melibatkan para penanggungjawab kegiatan. Apabila sekolah telah dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut untuk mengolah sumber data dan informasi lainnya, diharapkan sekolah yang bersangkutan dapat lebih bersikap responsif terhadap pertumbuhan dan kemajuan tuntutan lapangan kerja. Oleh karena itu, kualitas dan problem yang dihadapi para lulusan dapat segera dipecahkan.

**Kata kunci:** model jaringan sekolah, sekolah kejuruan, peningkatan kualitas

## **SCHOOL *NETWORKING* MODEL AS A BASIS OF EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT AT VOCATIONAL HIGH SCHOOL**

### **Abstract**

The objective of this study is to find out a networking model between vocational schools and the best matching stakeholders. The study is conducted in vocational schools in the province of Yogyakarta covering a range of three years. The study is research development in design. Data sources were parties from the job market, school principles, and vocational school development team. Data collection is conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis is descriptive. Research findings show: (1) The networking model developed in the study is effective for obtaining data and information about the needs of the job market; and (2) Schools have been able to translate data and information acquired from the fields in the form of operational activities including the persons in charge. When schools are able to further develop this ability to other sources of data and information, it is expected that the schools will be more responsive towards the growth and advancement of the needs of the job market. Therefore, quality and relevance problems of graduates can be solved.

**Keywords:** school networking model, vocational schools, quality improvement

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997-1998 belum juga teratasi dan telah berkembang menjadi

krisis multidimensional. Banyak pendapat bahwa permasalahan tersebut bersumber dari lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Seperti dikemukakan oleh Soedijarto (1998)

bahwa suatu negara atau bangsa yang tidak dapat mengembangkan sumber daya manusianya, negara tersebut tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk memperbaiki dan mengembangkan, baik dalam bidang politik, nasionalisme, maupun bidang ekonomi.

Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan indikator lemahnya kualitas pendidikan, sebab SDM pada dasarnya merupakan produk dari proses pendidikan. Oleh karena itu, langkah pemerintah dengan memunculkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Implementasinya diwujudkan dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan delapan pilarnya dan dihasilkan sekolah-sekolah yang telah memenuhi standar minimal dengan identitas Sekolah Standar Nasional (SSN). Di samping itu, juga mendorong sekolah-sekolah yang sudah SSN terus berkembang dan mempunyai standar internasional dengan identitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Dengan program tersebut, diharapkan dapat diatasi terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.

Harapan pemerintah tersebut sangat tergantung pada tahap implementasi program, yaitu kesiapan dan kemampuan sekolah sebagai unsur pelaksana program dan seberapa besar kendala yang dihadapi. Banyak kebijakan yang di tingkat makro diprediksi cukup baik, namun di tingkat mikro tidak dapat dilaksanakan karena tingkat hambatan di lapangan sangat bervariasi. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan tersebut, diperlukan tindak lanjut, yakni mengubah dorongan pengembangan eksternal menjadi pemberdayaan potensi internal sekolah. Untuk itu, sekolah memerlukan penguasaan strategi pengembangan yang berbasis pada *networking* dengan *stakeholder*-nya.

Hasil penelitian Szogs, dkk. (2003) menyimpulkan bahwa kekuatan dan kemajuan

suatu bangsa ditentukan oleh empat komponen pokok. Komponen tersebut adalah inovasi memberikan kontribusi sebesar 45%, jejaring kerja sama (*networking*) berkontribusi 25%, teknologi berkontribusi 20%, sementara sumber daya alam (*natural resources*) hanya berkontribusi sebesar 10%. Berdasarkan hasil penelitian ini jelas bahwa sumber daya alam tidak memberikan sumbangan yang berarti bila tidak dikelola oleh SDM yang inovatif dan memiliki jaringan (*networking*) yang kuat dalam mengembangkan semua potensi yang dimiliki.

Kebijakan bidang pendidikan tentang SNP yang akhirnya menghasilkan sekolah-sekolah SSN dan SBI merupakan salah satu terobosan inovasi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agar sekolah mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. Khususnya bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat memberikan bekal yang relevan bagi lulusannya, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun bekerja.

Keberhasilan program SSN dan SBI tentu sangat tergantung dari kemampuan dan komitmen masing-masing sekolah terhadap proses peningkatan kualitas. Tanpa adanya kesiapan, komitmen, dan pengelolaan lebih lanjut mustahil program tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Kualitas pendidikan di SMK diukur dari kualitas dan relevansi lulusannya dengan kebutuhan di lapangan (Calhoun and Finc, 1982). Sementara kebutuhan kemampuan di lapangan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan produktivitas dan perkembangan teknologi yang diaplikasikan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kualitas penyelenggaraan pendidikan SMK harus siap secara terus-menerus mengembangkan diri. Berdasarkan pengamatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program SSN dan SBI di beberapa daerah, ditemukan bahwa secara fisik program dapat dilaksanakan oleh

sekolah dan dibuktikan dengan berbagai hasil yang dicapai. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh melalui pengamatan dan wawancara, terlihat bahwa dalam kegiatan PBM relatif masih belum berubah. Indikator lainnya pencapaian rata-rata ujian nasional selama tiga tahun pembinaan relatif tidak ada kenaikan.

Permasalahan tersebut terjadi kemungkinan disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, warga sekolah masih beranggapan bahwa program SSN dan SBI pada dasarnya sama dengan program-program yang lainnya, yaitu selesai program selesailah kewajibannya dan mereka akan kembali pada karakteristik sebelumnya. Bila ini terjadi, tujuan program SSN dan SBI tidak akan mencapai sasaran seperti yang diharapkan. *Kedua*, warga sekolah memang tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan diri. Bila hal ini yang terjadi, diberikan fasilitas apapun sekolah relatif tidak akan ada perkembangan apapun.

Sampai dengan saat ini, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara sekolah dengan *stakeholder*-nya. Oleh karena itu, masalah di dalam penelitian adalah seperti apakah model pengembangan jejaring kerja sama (*networking*) antara SMK dengan *stakeholder* yang paling cocok dan baku untuk SMK. Penelitian ini layak dilakukan untuk mendukung keberhasilan program SSN dan SBI di SMK. Dengan ditemukannya model *networking*, penyelenggaraan pembelajaran di SMK akan selalu berkembang dan tujuan program SSN dan SBI dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

SMK merupakan salah satu jenis pendidikan menengah di Indonesia yang penyelenggaraannya dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya yang sifatnya spesifik. Kondisi dan perkembangan lapangan kerja dan lembaga kelanjutan studi siswanya menjadi acuan operasional

penyelenggaraan SMK. Orientasi lapangan kerja mengarahkan proses pendidikan di SMK cenderung lebih banyak memberikan proses belajar mengajar praktikum, untuk membentuk sikap, serta kemampuan dan keterampilan kerja bagi siswanya, sesuai dengan kebutuhan kemampuan keterampilan tenaga kerja di lapangan.

Berbicara mengenai kualitas SDM, pendidikan memegang peran yang sangat penting dan menentukan dalam proses peningkatan kualitas SDM tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Upaya pemerintah pada kenyataannya belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kurang berhasil ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti, bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil.

Permasalahan tersebut kemungkinan dapat dijelaskan berdasarkan dua faktor berikut ini. *Pertama*, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi *input-output* tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah). Strategi tersebut dapat diterapkan dengan hasil yang baik dalam institusi ekonomi dan industri.

*Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya,

banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Diskusi tersebut memberikan pemahaman bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor *input* pendidikan, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. *Input* pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada, namun dalam batas-batas tertentu tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu, sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik memerlukan layanan pendidikan yang beragam. Dengan kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya *benchmarking*).

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu digunakan tolok ukur atau *benchmarking* tertentu. Tolok ukur secara nasional telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan diterjemahkan ke dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP sebagai tolok ukur penyelenggaraan pendidikan terdiri atas delapan komponen utama, yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, serta standar penilaian. Kedelapan komponen SNP tersebut tentunya sudah ada di setiap sekolah, hanya kadar kualitasnya yang sangat bervariasi atau belum memenuhi kualitas yang diharapkan. Kekurangan pada kedelapan komponen akan menyebabkan menurunnya kualitas proses pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya *output* pendidikan.

Mutu lulusan pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat bantu dan bahan, manajemen sekolah, lingkungan sekolah, serta lapangan untuk latihan kerja siswa. Meskipun kurikulum hanya sebagai arah, tujuan, dan landasan filosofis pendidikan, namun kurikulum harus selalu dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan kebutuhan pasar kerja, serta dinamika perubahan sosial masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan manajemen dan budaya manajemen.

Penerapan program SNP yang kemudian memunculkan SMK SSN dan SMK SBI, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SMK di dalam menghasilkan kualitas produk seperti yang diharapkan. Setelah pembinaan selama tiga tahun, diharapkan SMK SSN dan SBI mau dan mampu mengembangkan diri (*self-improvement*). Harapan tersebut dapat diwujudkan bila sekolah tidak hanya mau, namun juga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh SMK SBI adalah memiliki sertifikat ISO 9000. Hal ini berarti SMK SBI telah menguasai sistem pengelolaan kualitas atau *Total Quality Management (TQM)*. Sementara itu, untuk SMK SSN belum dipersyaratkan. Namun demikian, seharusnya SMK SSN mulai

mempelajari masalah *TQM*. Kepala sekolah sebagai manajer perlu memahami dan mencoba *TQM* di lingkungan sekolahnya. Hakikat *TQM* adalah suatu pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait (Umaedi, 2000).

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai gejala dan fenomena yang ada di sekolah dan industri guna mengembangkan model *networking* (jejaring kerja sama) antara pihak sekolah (SMK) dengan *stakeholder* (industri) yang baik dan cocok untuk SMK. Untuk mengembangkan model manajemen *networking*, metode penelitian yang dipilih adalah penelitian dan pengembangan atau yang sering disingkat dengan R&D (*research and development*). Penelitian R&D merupakan pendekatan yang tepat digunakan untuk pengembangan proses pendidikan di sekolah, karena penelitian R&D merupakan perangkat evaluasi yang paling baik dalam penelitian dan pengembangan proses pendidikan, di dalamnya terdapat sistematika proses yang meliputi pengembangan dan penyempurnaan dari program serta bahan pendidikan (Kato, 2002:10).

Penelitian ini menggunakan prosedur R&D yang dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yakni analisis permasalahan dan kebutuhan, perencanaan model *networking*, pengembangan model *networking*, implementasi, pengendalian, dan sosialisasi.

Tahun pertama, penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan *networking* sekolah dengan *stakeholder* pendidikan di SMK. Hasil observasi dan identifikasi tersebut digunakan untuk menyusun model *networking* yang layak diterapkan di SMK. Model *networking* yang telah disusun kemudian divalidasi dan diujicobakan. Hasil penelitian pada tahun

pertama berupa rumusan model *networking* sekolah dengan *stakeholder* pendidikan kejuruan yang tervalidasi dan teruji untuk siap diterapkan di tahun kedua.

Pada tahun kedua dilakukan penerapan model *networking* sekolah dengan *stakeholder* pendidikan kejuruan pada beberapa SMK. Langkah pertama adalah melakukan sosialisasi model *networking* sekolah dengan *stakeholder* pendidikan kejuruan dan mengadakan pelatihan tentang kemampuan yang diperlukan untuk menerapkan model yang sudah diujicobakan pada beberapa sekolah. Langkah kedua adalah mengimplementasikan model *networking* sekolah dengan *stakeholder* pendidikan kejuruan. Pada proses implementasi tersebut akan dilakukan pemantauan untuk mengetahui efektivitas model. Hasil pemantauan yang mengungkap efektivitas model *networking* tersebut dianalisis, divalidasi, dan direvisi untuk menjadi produk akhir.

Kegiatan pada tahun ketiga adalah menyebarluaskan model *networking* sekolah dengan *stakeholder* pendidikan kejuruan yang telah terbukti efektivitasnya ini melalui proses deseminasi dan publikasi ilmiah. Deseminasi dilakukan dengan mengundang departemen terkait, kepala sekolah, guru, dan pemerhati pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kalangan dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan praktisi industri. Pengumpulan data menggunakan berbagai cara, yakni menyebar angket, dokumentasi, observasi/pengamatan, dan wawancara. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari angket dan dokumentasi dianalisis dengan analisis deskriptif. Untuk data yang sifatnya kualitatif, data hasil observasi dan wawancara akan diorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan saling melengkapi atau mengkonfirmasi dengan temuan-temuan kuantitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian pada tahun pertama telah berupa rumusan model *networking* bagi SMK. *Networking* sangat diperlukan agar SMK mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan oleh para *stakeholder*-nya. Kemampuan memberikan layanan dan hasil seperti yang diharapkan *stakeholder* ini merupakan keharusan bagi SMK, sebagai bentuk kesiapan SMK dalam melaksanakan mandat dari *stakeholder*. Keberhasilan melaksanakan mandat ini menjadi tolok ukur yang menjadi arah dan pedoman di dalam setiap kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Suatu organisasi dikatakan berhasil bila organisasi tersebut mampu melaksanakan mandat dengan berhasil. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan kegiatan pendidikannya, lembaga pendidikan seharusnya mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan mandat yang diterima dari *stakeholder*-nya. Hasilnya untuk menentukan program maupun tolok ukur keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan.

Model *networking* yang dikembangkan melalui penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan pendekatan yang efektif dan efisien dalam menjangkau informasi *stakeholder*. Hal ini sangat penting agar SMK mampu mengembangkan kualitas dan relevansinya terhadap kebutuhan lapangan kerja.

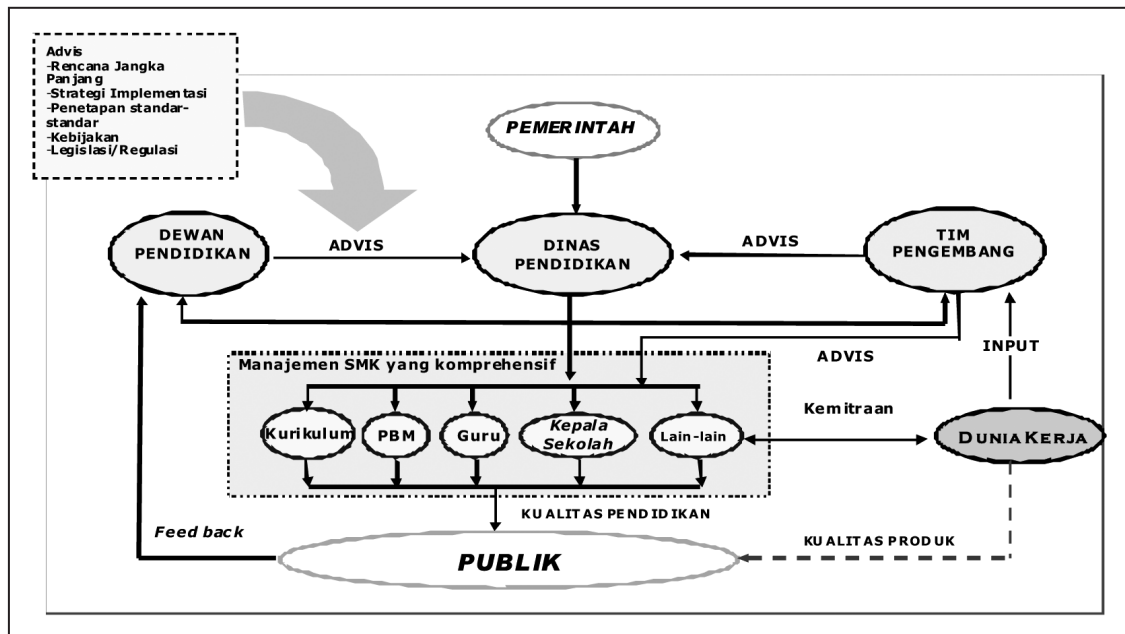
Model *networking* diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh SMK, yaitu masalah kualitas dan relevansi lulusannya terhadap kebutuhan lapangan. Selama ini ada kecenderungan kedua institusi berjalan sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi yang sinergi untuk saling menguatkan. Permasalahan ini akan teratasi bila SMK sebagai penyelenggara pendidikan memiliki data atau informasi yang memadai dari lapangan kerja. Data atau informasi lapangan diperlukan untuk mengembangkan dan menyesuaikan program kegiatan di sekolah sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat ditingkatkan efektivitasnya.

Terkait dengan data dan informasi lapangan tersebut, diperlukan mekanisme *networking* yang dikembangkan melalui penelitian ini. Dalam format model *networking* yang telah dikembangkan, memungkinkan dilaksanakan komunikasi secara terus-menerus antara tim pengembang dengan berbagai komponen *stakeholder* pendidikan. Model *networking* SMK dengan *stakeholder* yang telah dirumuskan dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan *networking* yang telah dikembangkan di atas dapat dideskripsikan bahwa secara kelembagaan Tim Pengembang dapat memberikan masukan kepada manajemen sekolah secara komprehensif berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan dianalisis dari dunia kerja. Tim Pengembang juga dapat memberi masukan/saran kepada dinas pendidikan yang berwenang mengatur regulasi/kebijakan yang berlaku di wilayah kewenangannya. Sementara itu, dapat dikembangkan juga berbagai kerja sama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Kerja sama tersebut memungkinkan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) memfasilitasi sarana untuk mengatasi kelemahan SMK dalam hal sarana pendidikan, sebab bagaimanapun lembaga pendidikan tidak akan mampu mengikuti perkembangan sarana teknologi yang berkembang cepat di lapangan.

Model *networking* yang telah dikembangkan masih perlu dilihat efektivitas dan efisiensinya melalui uji coba di sekolah. Di samping itu, perlu dipersiapkan kemampuan sekolah untuk mengelola data dan informasi hingga menjadi dasar kebijakan sekolah. Oleh karena itu, dalam penelitian tahun kedua difokuskan pada beberapa kegiatan, yaitu eksperimentasi model *networking*, proses pengambilan keputusan, dan aplikasi pengembangan pada kegiatan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

Eksperimentasi model *networking* perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi model tersebut. Untuk melakukan



Gambar 1. Model *Networking* Sekolah

eksperimentasi model *networking* tersebut, sebagai sampel kegiatan difokuskan pada pengaksesan data dan informasi persyaratan tenaga kerja lulusan SMK. Untuk itu dipersiapkan langkah-langkah sebagai berikut: 1) mempersiapkan operasional kerja *networking* dan petunjuk pelaksanaannya; 2) memilih sampel sekolah yang sudah siap dengan perangkat dan sumber dayanya dan dalam pelaksanaan dipergunakan dua SMK sebagai sampel eksperimentasi; 3) menentukan waktu pelaksanaan, yaitu selama tiga minggu; dan 4) mentabulasikan data dan informasi lapangan.

Hasil penelusuran data dan informasi selama eksperimen dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1) jumlah DU/DI yang dapat dihubungi lebih dari 50 perusahaan pengguna lulusan SMK yang tersebar di seluruh Indonesia; 2) DU/DI mempersyaratkan peringkat lulusan dari ranking 10 ke atas sebanyak 20%, ranking 15 ke atas sebanyak 14%, ranking 20 ke atas sebanyak 28%, dan sisanya tidak mempersyaratkannya; 3) DU/DI mempersyaratkan penguasaan

bahasa Inggris, yakni 14% mempersyaratkan bahasa Inggris aktif, 48% mempersyaratkan pasif, dan sisanya tidak mempersyaratkan penguasaan bahasa Inggris; 4) penguasaan komputer juga menjadi persyaratan bagi 75% industri; 5) prestasi mata pelajaran matematika di atas 6,0 menjadi persyaratan tenaga kerja bagi sekitar 72% dunia kerja; 6) prestasi mata pelajaran fisika di atas 6,0 dipersyaratkan oleh sekitar 65% perusahaan; 7) nilai mata pelajaran produktif di atas 6,0 dipersyaratkan oleh sekitar 80% perusahaan; 8) tinggi badan lulusan minimal 160 cm dipersyaratkan oleh sekitar 85% perusahaan; 9) kesehatan mata khususnya tidak buta warna dipersyaratkan oleh 95% perusahaan; dan 10) semua perusahaan mempersyaratkan lulusan yang bebas narkoba.

Berdasarkan perolehan data dan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa model *networking* yang dikembangkan dalam penelitian ini efektif dan efisien untuk menjaring data dan informasi kebutuhan lapangan kerja, meskipun baru sebatas pengaksesan data tentang persyaratan tenaga kerja lulusan

SMK. Efektivitas model *networking* dapat dilihat dari waktu yang diberikan hanya tiga minggu, namun dapat mengakses sekitar 50 perusahaan, dan sampel sekolah dapat membuat tabulasi datanya. Disamping itu, kegiatan ini relatif tidak memerlukan biaya sehingga dimungkinkan untuk dilakukan di SMK di masa yang akan datang.

Dalam *networking* yang telah dikembangkan terkandung kegiatan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan pada *networking* menganut model pengambilan keputusan inovatif. Pengambilan keputusan terhadap suatu inovasi tidak berhadapan dengan suatu alternatif yang belum ada, namun berhadapan dengan alternatif inovasi yang telah ada. Rogers (1995) dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan inovasi mengemukakan tiga tipe keputusan inovasi, yaitu keputusan opsional, keputusan kolektif, dan keputusan otoritas. Keputusan inovasi opsional adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang untuk menerima atau menolak suatu ide inovasi, terlepas dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok anggota sistem. Menurut Phesey (1993), bahwa seseorang untuk sampai pada saat menentukan keputusannya, melalui suatu proses tertentu mulai dari mengenal suatu ide inovasi, hingga mengambil keputusan menerima dan menolaknya. Proses pengambilan keputusan ini sering dilakukan oleh guru untuk mengembangkan proses pembelajaran, baik terkait dengan penyesuaian materi, metode mengajar, pengelolaan kelas, maupun cara evaluasi yang menjadi tugasnya di sekolah.

Model pengambilan keputusan inovasi opsional terdiri atas tiga bagian utama, yakni kondisi awal, persuasi, dan konfirmasi. Kondisi awal (*antecedent*) merupakan variabel-variabel yang telah ada sebelum mengenal suatu inovasi. Kondisi variabel awal ini semua berpengaruh terhadap proses adopsi inovasi pada setiap orang. Sumber dan saluran komunikasi memberikan rangsangan

(informasi) selama proses pengambilan keputusan. Pada tahap persuasi, seseorang membentuk persepsinya terhadap inovasi berdasarkan intensitas informasi yang diterima dan kriteria tertentu. Persepsi ini selanjutnya akan membentuk sikap seseorang dalam mengambil keputusan inovasi. Keputusan ini akan tetap atau berubah, saat seseorang menemukan ide baru yang lain atau karena kecewa terhadap hasil inovasi sebelumnya. Tahap ini yang disebut dengan tahap konfirmasi.

Model pengambilan keputusan kedua adalah keputusan inovasi kolektif, yaitu suatu proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh individu-individu yang tergabung di dalam suatu sistem melalui konsensus. Misalnya, kelompok guru bidang studi yang sama atau serumpun. Di kalangan guru dikenal istilah MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Biasanya mereka berkumpul secara berkala untuk membahas sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran, termasuk berbagai kemungkinan inovasi yang dapat dikembangkan oleh guru. Proses penerimaan atau penolakan inovasi dilakukan melalui kesepakatan bersama sehingga disebut dengan proses keputusan inovasi kolektif. Proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan model pengambilan keputusan opsional, sebab prosesnya melibatkan banyak orang. Dengan demikian, kemungkinan terjadi distorsi informasi dan variasi persepsi yang lebih besar serta kemungkinan untuk mencapai konsensus memerlukan waktu yang lebih panjang. Namun, hasilnya kemungkinan akan lebih baik dibandingkan dengan model yang pertama.

Model pengambilan keputusan yang ketiga adalah keputusan inovasi otoritas, yaitu keputusan yang dihasilkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, baik itu pada organisasi formal maupun informal. Namun, keputusan semacam ini lebih sering terjadi pada organisasi formal, seperti



Tabel 1. Hasil Keputusan Berdasarkan Data dan Informasi Lapangan Kerja

Data	Penafsiran	Keputusan	Keterangan
1.	1. Penyebaran lapangan kerja 2. Keterjangkauan lulusan 3. Peta jenis pekerjaan	1. Membuat informasi bursa tenaga kerja bagi lulusan. 2. Membuat informasi lapangan bagi guru	Ditugaskan pada bagian humas sekolah
2.	1. Perlu analisis kelemahan siswa-siswa di bawah ranking yang ditetapkan lapangan	1. Meningkatkan intensitas kegiatan pembelajaran. 2. Meningkatkan keg. remedial bagi siswa yang mengalami kendala	Ditugaskan pada semua guru sekolah
3.	1. Mengaktifkan penguasaan bahasa Inggris di sekolah	1. Mengefektifkan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris 2. Membuat hari berbahasa Inggris	Ditugaskan pada guru, khususnya guru bahasa Inggris.
4.	1. Pelatihan komputer di sekolah dan di luar sekolah	1. Mengintensifkan penggunaan lab komputer di sekolah 2. Membuat persyaratan kelulusan dengan sertifikat komputer	Ditugaskan pada waka kurikulum dan guru bahasa Inggris
5.	1. Intensitas pembelajaran matematika di sekolah	1. Pengembangan materi pembelajaran matematika 2. Meningkatkan kompetensi guru matematika 3. Memberikan tambahan pelajaran	Ditugaskan pada waka kurikulum dan guru matematika
6.	1. Intensitas pembelajaran fisika di sekolah	1. Pengembangan materi fisika 2. Mengefektifkan pembelajaran di laboratorium fisika 3. Mengembangkan sarana praktikum	Ditugaskan pada waka kurikulum dan guru fisika
7.	1. Intensitas pembelajaran mata pelajaran produktif di sekolah	1. Pengembangan materi pembelajaran mapel produktif 2. Mengembangkan sarana praktikum 3. Merancang penempatan PKL yang lebih relevan	Waka kurikulum dan guru mata pelajaran produktif
8. & 9.	1. Persyaratan input sekolah	1. Menentukan syarat input sekolah	Kepala sekolah
10.	1. Siswa bebas Narkoba	1. Membuat kegiatan penyuluhan terkait dengan narkoba 2. Membuat sangsi tegas terhadap siswa yang terlibat dengan narkoba	Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru

birokrasi pemerintahan, pabrik, sekolah, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam proses pengambilan keputusan ini, diwarnai oleh struktur sistem kekuasaan, di mana anggota

sistem tidak banyak pilihan terhadap proses keputusan inovasi. Berdasarkan data dan informasi lapangan yang diperoleh melalui uji coba, peserta pelatihan diminta untuk

mengkaji dan mengambil keputusan inovasi sekolah. Hasil yang dicapai ditabulasikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut terlihat bahwa sekolah sebagai sampel penelitian ini mulai mampu menerjemahkan data dan informasi yang didapatkan dari lapangan. Sekolah mampu menerjemahkan data dan informasi, menjabarkannya dalam bentuk operasional kegiatan, serta menentukan siapa penanggungjawabnya. Bila hal ini dapat dikembangkan lebih lanjut pada data dan informasi yang lainnya, diharapkan sekolah akan lebih responsif terhadap perkembangan dan kemajuan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, permasalahan kualitas dan relevansi lulusan akan dapat diatasi.

#### SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

*Pertama*, model *networking* yang dikembangkan dalam penelitian ini efektif dan efisien untuk menjaring data dan informasi kebutuhan lapangan kerja. Sekalipun waktu yang diberikan hanya tiga minggu, namun dapat menjangkau sekitar 50 perusahaan dan pihak sekolah dapat membuat tabulasi datanya. Di samping itu, kegiatan ini relatif tidak memerlukan biaya sehingga memungkinkan untuk dilakukan di SMK di masa yang akan datang.

*Kedua*, sekolah mulai mampu menerjemahkan data dan informasi yang didapatkan dari lapangan, menjabarkannya dalam bentuk operasional kegiatan, dan menentukan penanggungjawabnya. Bila hal ini dapat dikembangkan lebih lanjut pada data dan informasi yang lainnya, diharapkan sekolah akan lebih responsif terhadap perkembangan dan kemajuan kebutuhan di lapangan sehingga permasalahan kualitas dan relevansi lulusan akan dapat diatasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Calhoun, C.C. & Finch, A.V. 1982. *Vocational Education: Concepts and Operation*. Belmont: Wadsworth Publishing Co.
- Phesey, D.C. 1993. *Organization Cultures, Type and Transformations*. New York: Routledge.
- Rogers, E.M. 1995. *Diffusion of Innovation*. New York: The Free Press.
- Kato, S. 2002. "A Study At Research Method". *Jurnal Bunkyo Gakuin University*, Vol.4. No. 1 Japan.
- Soedijarto. 1998. *Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Szogs, A.; Cummings, A.; Chaminade, C. 2003. "Building Systems Of Innovation in Less Developed Countries". [Http://Smartech.Gatech.Edu/Jspui/Bitstream](http://Smartech.Gatech.Edu/Jspui/Bitstream). Diunduh Pada Tanggal 3 Maret 2009.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.